

**AGROPOLITAN BERBASIS SUBSEKTOR
PETERNAKAN**

Oleh:

Achmad Firman, SPt., MSi

**FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN
MARET 2007**

LEMBAR PENGESAHAN

Penelitian Mandiri

-
1. a. Judul Penelitian :
 “Agropolitan Berbasis Subsektor Peternakan”
 b. Bidang Ilmu : Pertanian/Ekonomi Peternakan
-
2. Peneliti
 a. Nama Lengkap dan Gelar : Achmad Firman, SPt., MSi
 b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 c. Gol/Pangkat/NIP : IIIb/Penata TK I/132 297 365
 d. Jabatan Fungsional : Lektor
 e. Jabatan Struktural : -
 f. Fakultas/Jurusan : Peternakan/Sosial Ekonomi Peternakan
 g. Pusat Penelitian : Universitas Padjadjaran
-
3. Lokasi Penelitian : Indonesia
-
4. Kerjasama dengan institusi lain : Tidak ada
-
5. Sumber Dana : -
-

Bandung, Maret 2007

Mengetahui
Kepala Laboratorium Ekonomi

Peneliti

Ir. Sri Rahayu, MS
NIP: 130 703 522

Achmad Firman, SPt., MSi
NIP: 132 297 36

Pendahuluan

Perdesaan merupakan suatu bagian wilayah yang tidak berdiri sendiri. Suatu wilayah bisa disebut perdesaan karena mempunyai karakteristik yang tidak sama dengan perkotaan. Suatu kawasan yang aktifitas utamanya atau aktifitas ekonomi penduduknya bersandar pada pengelolaan sumberdaya alam setempat atau pertanian dinamakan dengan kawasan perdesaan (UU 24 Tahun 1992).

Dalam pengembangan wilayah, kawasan perdesaan harus dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan kawasan perkotaan. Pemahaman yang menyeluruh dan tidak dikotomis ini menjadi penting dan mendasar dalam penyusunan peraturan atau aturan main yang berkaitan dengan perdesaan maupun perkotaan, agar terjadi sinergi dan keseimbangan perlakuan wilayah, khususnya oleh pelaku pembangunan. Selama ini masyarakat perdesaan dicirikan dengan kondisinya yang serba kurang apabila dibandingkan dengan masyarakat perkotaan. Dari segi ekonomi, jelas terbukti bahwa masyarakat kota lebih mempunyai taraf kehidupan jauh diatas masyarakat perdesaan. Dari segi pendidikan, jumlah serta kualitas pendidikan masyarakat desa jauh dibawah masyarakat perkotaan.

Kemampuan berpolitik masyarakat perkotaan pun lebih elegan dibanding kemampuan masyarakat perdesaan. Dari segi ikatan sosial, memang masyarakat perdesaan mempunyai sedikit kelebihan dibanding masyarakat perkotaan, terutama dalam sikap tolong-menolong (bergotong-royong) sebagai cerminan dari semangat UUD 45, walau sekarang sifat tersebut mulai tererosi pula dengan masuknya teknologi informasi ke perdesaan.

Kenyataan tersebut terbentuk karena sistem, termasuk kelembagaan dan peraturan, yang berkembang selama ini. Apabila tetap diteruskan, artinya tidak ada terobosan yang berarti, baik dari sisi kebijakan atau peraturan maupun *willingness* Pemerintah serta pelaku pembangunan lainnya, tentu termasuk masyarakat desanya sendiri, maka mereka akan tetap seperti itu, yaitu miskin dan tak mempunyai *bargaining position*. Bahkan predikat negatif lainnya pun akan semakin bertambah.

Wilayah perdesaan di Indonesia secara mayoritas dihuni oleh para petani kecil yang berpendapatan rendah sampai miskin. Mereka merupakan golongan terbesar dalam populasi penduduk di negara ini. Bahkan mereka juga merupakan golongan terbesar dari penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan, karena gejala kemiskinan di wilayah perdesaan ternyata lebih meluas jika dibandingkan dengan kemiskinan di perkotaan. Data tahun 1998 memperkirakan bahwa penduduk dibawah garis kemiskinan sekitar 60.7 % berada di perdesaan, sedangkan sisanya 39.3 % berada di perkotaan. Dengan bertumbuhnya penduduk 1.51 % per tahun, yang dapat dirinci untuk Jawa 2.16 % per tahun dan luar Jawa 0.58 % per tahun, maka keadaan ini akan memberikan angkatan kerja di wilayah perdesaan terutama di Jawa yang tumbuh semakin banyak.

Oleh karenanya sekarang memerlukan tinjauan evaluasi mengenai paradigma pembangunan lama yang menyangkut konsep pembangunan ekonomi tradisional yang berkait dalam hubungan perdesaan-perkotaan (*rural-urban relationships*), menyangkut surplus tenaga kerja disektor pertanian dan perdesaan. Berdasarkan Efendi Anwar

(2001) mengemukakan bahwa salah satu model seperti yang dikemukakan oleh beberapa pakar teori, yang membahas tentang terjadinya migrasi penduduk dari wilayah perdesaan ke perkotaan seperti antara lain mengacu pada model ekonomi dualistik (*dual economies*) dikemukakan oleh Marx (1867), Boeke (1953, 1954), W. Arthur Lewis (1955) dan Fei and Ranis (1964). Mereka mengasumsikan bahwa proses dari pertumbuhan ekonomi modern harus berkait dengan terjadinya pergeseran besar dalam pasar tenaga kerja dari wilayah perdesaan yang kesempatan kerjanya sempit untuk berpindah (bermigrasi) ke pusat-pusat industri di kawasan perkotaan. Dalam proses ini kegiatan industri manufaktur berskala kecil seperti yang terdapat pada rumahtangga dan bengkel-bengkel kecil di wilayah perdesaan, diperkirakan (dihipotesiskan) tidak akan mampu bersaing dengan pabrik modern yang memproduksi di pusat-pusat kota-kota besar yang mengalami *economy of scale*. Sebagai akibatnya ekonomi sektor perdesaan menjadi semakin terspesialisasi dalam produksi primer (pertanian secara luas) yang menggarap untuk menghasilkan komoditas pertanian (pangan) guna menyediakan kebutuhan penduduk, terutama yang bertumbuh di kawasan perkotaan dan terlibat dalam memproduksi budidaya tanaman yang menghasilkan uang (*cash crops*). Tanaman terakhir ini dibutuhkan untuk keperluan ekspor yang dapat menghasilkan pendapatan devisa guna mendukung pembangunan industrialisasi impor substitusi (*import substitution industries*) yang dihadirkan di dalam negeri.

Seperti yang diungkapkan oleh Efendi Anwar (2001) bahwa temuan Simon Kuznets pada tahun 1955 (pemenang Hadiah Nobel 1971) dengan kurva U-terbalik yang memberi kesimpulan bahwa ketidak-merataan pendapatan (*income inequality*) lebih buruk terjadi pada permulaan pembangunan (pada negara berpendapatan rendah) yang tercemrin dari rendahnya tingkat pendapatan per kapita; tetapi kemudian pendapatan per orang akan meningkat dengan pemerataan yang lebih baik. Kesimpulan ini memberikan implikasi tentang adanya sifat bertolaktimbang (*trade off*) antara pertumbuhan dan pemerataan ekonomi di negara berkembang. Implikasi dari kesimpulan Kuznets ini telah banyak dipakai sebagai pegangan oleh para penentu kebijaksanaan pembangunan termasuk di Indonesia untuk mendahulukan tujuan pertumbuhan ekonomi dari pada pemerataannya dalam merancang program-program pembangunan. Tindakan kebijaksanaan ini, terutama terjadi setelah tahun 1985, yang memperparah terjadinya ketimpangan investasi antara sektor pertanian dan wilayah perdesaan dengan sektor "modern" yang berlokasi di kawasan perkotaan. Sehingga pertumbuhan ekonomi antara keduanya semakin lama menjadi semakin timpang dan mendorong terjadinya percepatan arus migrasi penduduk perdesaan ke kawasan perkotaan.

Persoalan migrasi penduduk perdesaan ke kota-kota (*rural-urban migration*) telah banyak ditelaah, seperti yang dihipotesiskan oleh hipotesis harapan upah (*expected wage hypothesis*) yang banyak dapat dibenarkan secara, seperti dikemukakan oleh Todaro (1969), Harris dan Todaro (1970). Hipotesis tersebut mengemukakan bahwa daya tarik penduduk perdesaan untuk bermigrasi terutama ditentukan bukan hanya karena perbedaan upah, tetapi juga ditentukan oleh peluang (*probability*) untuk mendapatkan pekerjaan di kota-kota besar. Dalam hubungan ini terdapat juga teori yang menyangkut migrasi tenaga kerja secara internasional (Duringer dan Pior, 1971 yang dikutip oleh Efendi Anwar, 2001). Sesuai dengan teori ini masyarakat industrial menjadi tersegmentasi kedalam pasar tenaga kerja primer dan sekunder. Tenaga kerja penduduk pribumi lebih menyukai untuk tidak mengambil lapangan kerja pada pasar

tenaga kerja sekunder yang kurang menarik, sehingga menimbulkan keadaan *vacum* yang hanya dapat diisi oleh tenaga kerja dari luar wilayah.

Pada kenyataannya memang dibanyak kota-kota, sektor pasar tenaga kerja primer diambil oleh tenaga dari luar (negeri). Sebagai akibatnya, pada kenyataannya ekonomi dualistik secara efektif berlaku di kota-kota dimana pasar tenaga kerja primer mempunyai upah yang beberapa kali jauh lebih besar dibanding dengan upah pada pasar sekunder yang tidak terorganisasi secara baik. Sebagai akibatnya sebagian besar penduduk perdesaan yang bermigrasi ke kota-kota besar bukan mencari pekerjaan yang berupah tinggi di sektor formal, melainkan mereka mencari pekerjaan secara serabutan (asal saja), bahkan jika secara permanen pekerjaan yang berupah rendah pada sektor informal. Oleh karena itu sekitar lebih dari 75 % penduduk yang bermigrasi ke kota-kota dari wilayah perdesaan banyak yang bermukim di kawasan-kawasan kumuh, yang penyebab utamanya adalah karena alasan rendahnya pendapatan mereka. Oleh karena itu persoalan pokok dari membengkaknya jumlah penduduk di kota-kota besar yang menimbulkan masalah-masalah lingkungan hidup di kota-kota besar dan berkurangnya kesempatan kerja di wilayah perdesaan adalah ketersediaan lapangan kerja, dimana kota-kota menjanjikan kesempatan untuk memperoleh lapangan kerja adalah relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kesempatan di wilayah perdesaan.

Dalam sistem ekonomi yang memperhitungkan dimensi spasial, kawasan kota-kota memang merupakan bagian yang sangat kompleks dari struktur keseimbangan umum (*general equilibrium*) yang berkaitan dengan aktivitas konsumsi dan produksi dan perdagangan. Karena jika produksi terjadi dalam skala rumah tangga yang kecil-kecil yang tersebar berjauhan yang berjauhan satu sama lain, maka dipandang dari kepentingan swasta menjadi tidak akan efisien. Sehingga, agar dapat mencapai efisiensi yang tinggi, maka diperlukan adanya skala ekonomi (*economies of scale*) dalam sektor produksi baik pada tingkat perusahaan maupun pada tingkat industri (Anwar, 1994). Oleh karena itu dengan terjadinya proses aglomerasi ekonomi dari sekumpulan rumah tangga di suatu kota yang dapat menyediakan sejumlah besar tenaga kerja yang dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan untuk memanfaatkan skala ekonomi, yang dicirikan oleh terus menurunnya biaya rata-rata dalam memproduksi barang-barang dan jasa dengan semakin besarnya tingkat produksi yang sangat diperlukan bagi penduduk kota maupun untuk di ekspor ke wilayah lain.

Dalam pengertian Losch (1954), skala ekonomi tersebut terjadi disebabkan karena adanya penanaman biaya modal pada permulaan (*initial fixed capital cost*) yang besar dalam produksi, seperti biaya-biaya untuk bangunan pabrik dan alat-alat mesin. Keadaan tersebut mendorong terjadinya biaya produksi dan biaya tenaga kerja per unit yang terus menerus berkurang. Biaya-biaya latihan dan mengupah tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja juga turut menurun dengan bertumbuhnya pasar tenaga kerja dalam industri pada lokasi tertentu.

Oleh karenanya dengan membesarnya pasar tenaga kerja di kawasan perkotaan akan mengarah kepada ketersediaan berbagai keterampilan dan keahlian yang lebih terspesialisasi. Apabila pelatihan tenaga kerja tersebut dilakukan oleh program pemerintah, maka perusahaan yang bekerja di kawasan kota juga menerima ekonomi eksternal yang menguntungkan perusahaan-perusahaan yang bersangkutan. Dari sektor

konsumsi di kawasan kota-kota juga terjadi skala ekonomi yang sama, khususnya yang terjadi pada kegiatan produksi jasa-jasa di tingkat pengecer. Dari sudut para pembeli atau konsumen, dengan adanya pusat perbelanjaan dan supermarket yang menyediakan berbagai macam produk barang yang luas akan mengurangi biaya-biaya pencarian dan informasi (*information gathering*) untuk membeli sesuatu barang. Demikian juga dari sudut pandang saluran para pengecer, biaya pembelian dan biaya inventori akan berkurang dengan bertambahnya skala ekonomi. Terjadinya skala ekonomi dalam produksi di kota-kota tidak bertentangan dengan skala ekonomi di bidang pertanian di mana produksi pertanian tersebar pada unit-unit rumah tangga yang terdapat luas di wilayah perdesaan. Tetapi dalam produksi pertanian dibutuhkan input lahan yang lebih luas relatif terhadap kebutuhan tenaga kerja. Sedangkan dalam sistem produksi kawasan perkotaan sebaliknya dibutuhkan konsentrasi tenaga kerja dan penggunaan energi yang besar per unit luas lahan untuk memanfaatkan skala ekonomi dalam manufaktur, dan dalam produksi barang yang berupa jasa-jasa. Oleh karena itu, secara alamiah, yaitu ditinjau dari kepentingan swasta, kekuatan aglomerasi kawasan perkotaan secara ekonomi memang menjadi daya tarik yang kuat.

Tetapi proses transformasi struktur ekonomi ke arah industrialisasi dan bertumbuhnya sektor-sektor modern (industri dan jasa) dimasa lalu, selain terlalu dipercepat (*accelerated*) sehingga mengarah kepada proses yang tidak matang (*immature*), dimana sektor pertanian dan perdesaan kurang mendapat perhatian dalam investasi diberbagai bidang di luar usaha tani. Karena perkembangan sektor industri ternyata banyak yang kurang/tidak tidak terkait secara langsung dengan sektor pertanian dan perdesaan. Sebagai akibatnya di sektor-sektor pertanian dan perdesaan tidak memberikan tempat untuk menyerap tenaga kerja lebih banyak, padahal pertumbuhan angkatan kerja di sektor tersebut relatif tinggi. Sebagai akibatnya terjadi kelebihan (*excess supply*) tenaga kerja yang kemudian bermigrasi secara eksekusif dari perdesaan ke perkotaan yang apabila ukuran kota mengalami '*diseconomies of scales*' kemudian menimbulkan berbagai "penyakit" urbanisasi yang berdampak dan menimbulkan biaya-biaya sosial maupun kerusakan lingkungan hidup. Pertumbuhan sektor industri yang dipacu oleh kebijaksanaan pemerintah, ternyata terlalu bergantung (*over dependent*) kepada kapital dari luar dan mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*), sehingga keadaan ekonomi nasional yang berkaitan dengan ekonomi dunia yang dinamik, kemudian menjadi rentan terhadap resiko-resiko yang suatu waktu mengadi penyebab ambruknya sektor tersebut, seperti sama-sama kita saksikan akhir-akhir ini.

Dengan demikian, ditinjau dari sudut logika pembangunan ekonomi, guna menghindari pengalaman pahit dari yang lalu, maka antara industrialisasi dan urbanisasi harus dianggap tidak mesti mempunyai keterhubungan yang tidak dapat dihindari. Keduanya tidak harus merupakan unsur-unsur yang saling berkait dan tak terpisahkan satu sama lain, seperti yang diasumsikan dalam paradigma pembangunan ekonomi berdasar teori tradisional. Analisis yang dikemukakan disini menganut tinjauan aspek spatial yang justru ingin mencari jalan, dengan mencari jalur alternatif yang dapat mengarah kepada pembangunan ekonomi, dimana diharapkan akan ada kemungkinan terjadinya faktor pendorong (*inducement*) yang mampu menggerakkan sistem produksi manufaktur padat karya maupun modern yang berbasis di lokasi wilayah perdesaan, sebagai alternatif pengganti dari terjadinya proses migrasi tenaga kerja dari perdesaan ke sektor perkotaan. Pada jalur alternatif ini diharapkan akan terjadi penyebaran aktivitas-

aktivitas industri di wilayah perdesaan yang dapat diorganisasikan dengan cara terdesentralisasikan yang memanfaatkan bukan hanya tenaga kerja fisik, tetapi juga dapat menumbuhkan potensi kemampuan kewirausahawan dari masyarakat perdesaan yang merupakan dua sumberdaya yang kurang di manfaatkan oleh pemerintah selama ini, terutama di masa lalu sebelum terjadinya krisis. Strategi pembangunan industrialisasi berbasis di lokasi wilayah perdesaan melalui pembangunan ini jika memungkinkan, bertujuan untuk dapat diwujudkan pemerataan dan menghilangkan kesulitan besar terhadap keadaan dimana sering terjadinya *trade-off* antara aspek pertumbuhan.

Tetapi dengan mengacu kepada teori ekonomi penting yang disebut "*The Second Fundamental Theorem of Welfare Economics*" yang menyatakan bahwa alokasi sumberdaya yang efisien (*Pareto efficiency*) yang mengarah kepada keseimbangan kompetitif, dapat didukung oleh suatu tindakan pemerintah (yang diinginkan) melalui sistem perpajakan dan transfer (subsidi atau pinjaman); sedangkan hal-hal lain dalam ekonomi dapat diserahkan kepada bekerjanya mekanisme pasar yang kompetitif. Dalil ini mempunyai implikasi yang penting dalam memberi justifikasi tentang pentingnya pemerataan dalam ekonomi, yang dalam hal pembangunan mikropolitan merupakan pemerataan dalam dimensi spasial, untuk dapat menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karenanya dalam kaitan dengan pembangunan, pemerintah dapat bertindak untuk mencapai tujuan tingkat pemerataan tertentu yang diinginkan, dengan melakukan redistribusi alokasi sumberdaya (kapital, lahan dan sumberdaya alam lainnya) secara spasial; sedangkan selebihnya yang menyangkut efisiensi sebaiknya pemerintah membiarkan untuk dapat memungkinkan bekerjanya sistem pasar (yang bersaing), agar keseimbangan ekonomi yang efisien dapat tercapai. Sehingga apabila gagasan ini dapat diwujudkan, maka antara pertumbuhan dan pemerataan akan berjalan bersama, yang tidak perlu dipertentangkan lagi. Sedangkan faktor yang dapat merangsang kaum swasta dan organisasi kemasyarakatan untuk mengarahkan aktivitas industrialisasi ke wilayah perdesaan, guna melawan arus kekuatan aglomerasi kawasan perkotaan, kemudian dapat dirangsang dengan instrumen insentif fiskal dan pengembangan lembaga keuangan dan pasar keuangan dan reformasi agraria di wilayah perdesaan.

Sekarang setelah terjadinya krisis, dipertanyakan bagaimana cara mengatasi terjadinya peningkatan jumlah orang-orang penganggur dari golongan miskin dan ketidakmerataan antara wilayah perdesaan dan kawasan perkotaan dapat dipecahkan ?. Jika inti dari persoalan ditentukan oleh tekanan pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan berkurangnya pendapatan tenaga kerja relatif terhadap modal dan lahan, maka upaya dan program yang maksimum harus dialokasikan kepada kegiatan untuk meningkatkan pertumbuhan permintaan terhadap tenaga kerja yang terus bertumbuh.

Dua bidang yang jelas yang mampu menampung perluasan lapangan kerja tersebut adalah sektor pertanian dan industri kecil dan menengah di wilayah perdesaan, yang meskipun dari pengalaman lalu telah mengalami terjadinya revolusi teknologi hijau yang telah memberikan sumbangan besar kepada peningkatan produksi pangan, kepada GDP dan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Tetapi ternyata teknologi tersebut tidak cukup untuk memecahkan masalah lapangan kerja di wilayah perdesaan,

karena terus bertumbuhnya angkatan kerja dan oleh karenanya alternatif pilihan kedua harus dicarikan jalan pemecahannya.

Konsep Awal Agropolitan

Konsep kawasan agropolitan sebetulnya merupakan konsep yang ditawarkan oleh Friedman dan Douglas (1975) atas pengalaman kegagalan pengembangan sektor industri di beberapa negara berkembang (di Asia) yang mengakibatkan terjadinya berbagai kecenderungan, antara lain (a) terjadinya *hyperurbanization*, sebagai akibat terpusatnya penduduk di kota-kota yang padat; (b) pembangunan “modern” hanya terjadi di beberapa kota saja, sementara daerah pinggiran relatif tertinggal; (c) tingkat pengangguran dan setengah pengangguran yang relatif tinggi; (d) pembagian pendapatan yang tidak merata (kemiskinan); (e) kekurangan bahan pangan, akibat perhatian pembangunan terlalu tercurah pada percepatan pertumbuhan sektor industri (*rapid industrialization*); (f) penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat desa (petani) dan (g) terjadinya ketergantungan pada dunia luar.

Konsep “Agropolitan” merupakan konsep yang dikembangkan sebagai siasat dalam pengembangan pedesaan. Konsep ini pada dasarnya memberikan pelayanan perkotaan di kawasan pedesaan atau dikenal dengan istilah “kota di ladang”. Pusat pelayanan diberikan baik dalam bentuk pelayanan teknik budidaya pertanian, kredit modal kerja dan informasi pasar sehingga dapat menekan biaya produksi dan biaya pemasaran. Konsep ini berupaya dalam pembentukan masyarakat pedesaan yang mandiri dengan kemampuan mencukupi kehidupannya sehari-hari. Fasilitas pelayanan difokuskan dalam memberikan kemudahan produksi dan pemasaran antara lain berupa input sarana produksi (pupuk, bibit, obat-obatan, dan peralatan), sarana penunjang produksi (lembaga perbankan, koperasi, listrik) dan sarana pemasaran (pasar, terminal angkutan, dan sarana transportasi).

Pengembangan konsep “Agropolitan” dilakukan melalui pengembangan agribisnis. Pengembangan agribisnis tidak hanya terbatas pada pengembangan pertanian primer atau subsistem *on farm agribusiness*, tetapi juga mencakup subsistem agribusiness hulu (*up stream agribusiness*), yaitu industri-industri yang menghasilkan sarana produksi bagi pertanian primer, seperti industri pembibitan/pembenihan, industri agro-otomotif, industri agro-kimia dan subsistem agribisnis hilir (*down stream agribusiness*) yaitu industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan beserta perdagangannya.

Konsep Pembentukan dan Pengembangan “Agropolitan”

Kondisi pertanian di Indonesia pada umumnya belum merupakan suatu kegiatan yang integratif antara budidaya, penanganan pasca panen, pengolahan sampai pemasaran. Selain karena kurangnya perhatian dari pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan pertanian, terdapatnya system yang terpisah antara pedesaan dengan kota. Sedangkan seperti yang kita ketahui bahwa semua aktivitas ekonomi, informasi dan teknologi

banyak yang terpusat di perkotaan, termasuk agroindustri dan agrokimia. Sehingga masyarakat pedesaan mengalami kesulitan dalam hal pemasaran dan pengolahan produk. Oleh karena itu, diperlukan suatu keterkaitan fungsional yang menyatu antara hubungan pedesaan dan kota dalam segala aspek khususnya pertanian.

Fenomena yang menyebutkan bahwa pertanian kita masih jauh tertinggal dengan negara lain bahkan dengan Israel yang hanya berlahan gurun pasir. Hal ini disebabkan karena sektor agribisnis masih terpisah-pisah antara hulu sampai hilir, belum merupakan suatu kesatuan yang integratif. Sumberdaya alam dan sumberdaya manusia khususnya daerah pedesaan belum dikelola dan dikembangkan secara optimal. Selain itu, kurangnya peran serta lembaga-lembaga ekonomi baik swasta maupun pemerintah dalam mengelola dan mengembangkan sektor pertanian. Dengan dibentuknya "Agropolitan", sektor agribisnis diharapkan dapat berkembang dalam kesatuan yang integratif dari hulu sampai hilir dengan didukung oleh peran serta pihak swasta, pemerintah dan masyarakat.

Pengembangan sektor agribisnis dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan faktor determinan. Faktor lingkungan meliputi perubahan struktur ekonomi; alih fungsi kawasan; globalisasi; teknologi pengelolaan SDA; nilai social budaya; peran swasta dan masyarakat. Era globalisasi mengakibatkan perubahan dalam segala aspek termasuk teknologi dan nilai social budaya. Tuntutan jaman dan modernisasi mungkin akan mengakibatkan perubahan struktur ekonomi. Ekonomi pertanian yang mendominasi daerah pedesaan mungkin akan berubah menjadi ekonomi industri atau bentuk perekonomian lainnya. Suatu wilayah semakin lama akan semakin padat penduduknya sehingga kemungkinan akan terjadi alih fungsi kawasan. Lahan pertanian di daerah pedesaan akan mengalami alih fungsi menjadi daerah pemukiman karena penambahan penduduk.

Berdasarkan Ruchiyat Deni (2001) mengemukakan bahwa Gambaran konseptual dari struktur pengembangan kawasan agropolitan mencakup :

- a). pusat-pusat kegiatan utama
- b). sebaran kegiatan-kegiatan permukiman dan pertanian
- c). keterkaitan pusat-pusat kegiatan produksi
- d). orientasi pusat-pusat permukiman (hilir dan hulu)
- e). orientasi hubungan keluar dari wilayah (pemasaran)

Agar kawasan agropolitan ini dapat mempunyai daya saing yang sehat dengan kawasan lainnya, terutama dalam mengoptimalkan keunggulan komparatifnya, maka pengembangan kawasan agropolitan tersebut haruslah diberikan insentif yang mendorong perkembangannya. Pengembangan kawasan tersebut haruslah dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kawasan lain dalam sistem pengembangan wilayah secara menyeluruh.

Konsep Agropolitan Berbasis Peternakan

Berbagai definisi mengenai konsep pembangunan agropolitan telah banyak diungkapkan oleh beberapa peneliti. Sedangkan konsep agropolitan itu sendiri telah muncul pada tahun 1970-an sebagai upaya untuk mengantisipasi konsep pembangunan

growth polar yang lebih mengedepankan pembangunan kota sebagai kutub pertumbuhan yang bisa memberikan efek pada perdesaan. Akan tetapi, pada kenyataannya konsep tersebut malah mengeksploitasi sumber daya alam di perdesaan untuk kepentingan pertumbuhan kota sehingga dampak turunannya adalah lahan-lahan di perdesaan beralih fungsi dan orang-orang perdesaan bermigrasi ke kota untuk mencari penghasilan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat diambil beberapa asumsi yang berkenaan dengan konsep pembangunan agropolitan di suatu wilayah, yaitu:

1. Mencegah urbanisasi dari perdesaan ke daerah perkotaan melalui penyediaan lapangan kerja di sektor pertanian
2. Dibangun berdasarkan *agriculture based*, yaitu melalui sistem agribisnis
3. Sektor infrastruktur (jalan, telekomunikasi, transportasi, dan sebagainya) mendukung pembangunan pertanian untuk melakukan akselerasi pembangunan pertanian di wilayah agropolitan.
4. Pengembangan agropolitan disesuaikan dengan keunggulan subsektor pertanian di wilayah masing-masing, yaitu subsektor tanaman pangan, peternakan, perikanan, perkebunan ataupun kehutanan.
5. Pada konsep agropolitan, seluruh subsektor pertanian harus saling mendukung sehingga mampu memanfaatkan sumber daya lokal termasuk plasma nutfahnya.
6. Agropolitan dibangun di wilayah *sub urban arealbuffer land* (wilayah penyangga antara kota dan desa) dan perdesaan (*rural area*)
7. Syarat utama dari pembangunan agropolitan adalah ketersediaan lahan dan penguatan kelembagaan.

Asumsi-asumsi di atas menjadi jelas bahwa agropolitan bertujuan untuk membangun industri pertanian di wilayah perdesaan dan sub urban dalam rangka penyerapan tenaga kerja lokal. Di samping itu, konsep pembangunan agropolitan juga ditunjukkan untuk membangun sektor pertanian yang berkelanjutan dengan lebih mengandalkan potensi lokal sebagai basis pengembangan.

Berdasarkan konsep tersebut, maka pembangunan konsep Agropolitan dengan basis Subsektor Peternakan sebagai subsektor unggulan, selain asumsi-asumsi di atas, maka asumsi lainnya adalah:

1. Pembangunan agropolitan berbasis peternakan dibangun berdasarkan konsep LEISA (*Low External Inputs and Sustainable Agriculture*) dan ZERO WASTE
2. Konsep LEISA lebih mengedepankan penggunaan input lokal dan sumber daya plasma nutfah (bibit ternak) yang bisa dihasilkan oleh wilayah itu untuk menunjang keberlanjutan peternakan
3. Konsep *Zero Waste* lebih mengedepankan penggunaan limbah peternakan dan limbah pertanian untuk dimanfaatkan sebagai input produksi yang bisa mengurangi masalah lingkungan dan menekan biaya.

Untuk lebih jelasnya mengenai Konsep Agropolitan berbasis Subsektor Peternakan dapat dilihat pada Gambar 1. Pada gambar tersebut dapat menjelaskan bahwa konsep Agropolitan Berbasis Peternakan lebih mengedepankan konsep LEISA dan *Zero Waste* sebagai upaya untuk membangun agropolitan di wilayah *suburban* dan *rural*. Subsektor peternakan sebagai *leading sector* di suatu wilayah harus didukung oleh sektor lainnya,

seperti subsektor tanaman pangan, sektor infrastruktur, sektor perikanan, dan sektor-sektor lainnya untuk mengembangkan subsektor peternakan menjadi sektor yang diunggulkan. Tentunya, pemilihan subsektor peternakan sebagai *leading sector* harus didasarkan pada dampak penyebaran subsektor tersebut untuk pembangunan di suatu wilayah. Ada dua criteria yang digunakan untuk melihat bahwa sektor tersebut menjadi prioritas pembangunan atau tidak (Rasmussen dalam Daryanto dan Morison tahun 1992), yaitu :

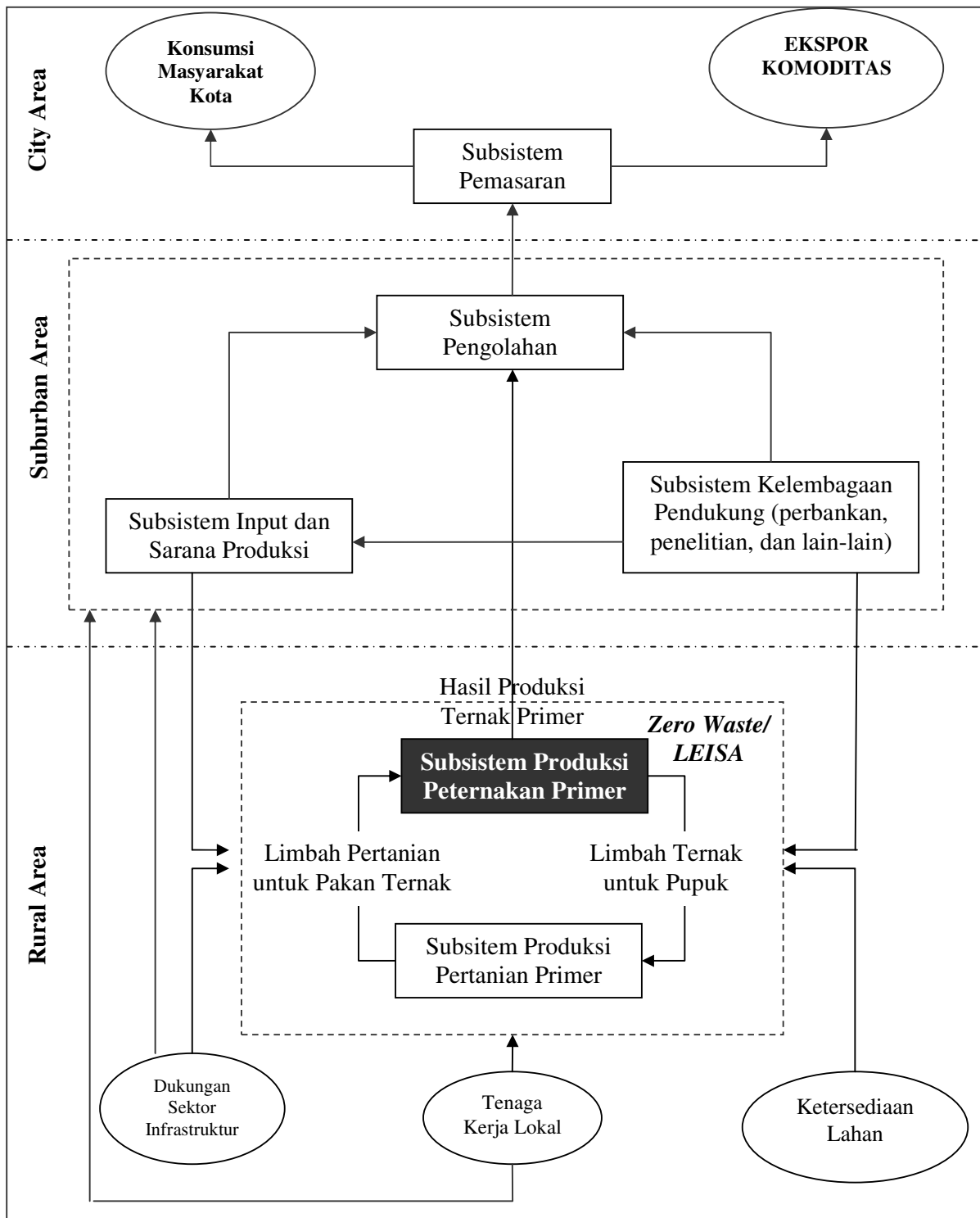
- a. Menghitung derajat kepekaan (*degree of sensitivity*), yaitu peningkatan output sektor tersebut dapat meningkatkan sektor hilirnya, dan
- b. Daya penyebaran (*power of dispersion*), yaitu keberadaan sektor tersebut dapat mendorong sektor hulunya

Dengan demikian, konsep agropolitan diawali dengan identifikasi sektor-sektor unggulan di suatu wilayah, apakah itu di tingkat desa, kecamatan, ataupun kabupaten/kota.

Pada gambar 1 ditunjukkan bahwa awal dari pembangunan agropolitan berbasis peternakan dimulai di wilayah perdesaan sebagai basis hasil produksi primer yang didukung oleh subsistem input dan sarana produksi serta subsistem kelembagaan pendukung yang dibangun di wilayah suburban. Di mana, hasil produksi primer tersebut dijual ke industri pengolahan yang juga dibangun di wilayah suburban. Tujuannya pembangunan ketiga subsistem agribisnis yang dibangun di wilayah suburban adalah untuk penyerapan tenaga kerja local sehingga bisa membendung arus urbanisasi. Hasil dari subsistem pengolahan selanjutnya dijual ke subsistem pemasaran yang berada di wilayah perkotaan yang selanjutnya dijual ke konsumen di kota ataupun untuk kepentingan ekspor.

Dengan demikian, pembangunan agropolitan berbasis peternakan ditunjukkan untuk membangun subsektor peternakan menjadi industri peternakan dengan basis perdesaan sebagai wilayah pengembangan subsektor peternakan.

Gambar 1. Konsep Agropolitan Berbasis Peternakan
(Achmad Firman, 2007)



Daftar Pustaka

- Djohar, I. 1999. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan Masyarakat Kotamadya Batam dengan Pendekatan Model Sistem Neraca Sosial Ekonomi (SNSE). Tesis Magister Sains. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor, Bogor.
- Efendi Anwar. 2001. Desentralisasi Spasial Melalui Pembangunan Agropolitan, dengan Mereplikasi Kota-kota Kecil-Menengah di Wilayah Perdesaan. Makalah lokakarya 'Proyek Perintisan Pengembangan Perdesaan'. Badan Perencana Pembangunan Nasional. Jakarta
- Esmara, Hendra. 1993. Perencanaan Pembangunan. Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi. Universitas Indonesia. Jakarta.
- Jensen, R.C and G.R. West. 1986. Input-Output for Practitioners: Theory and Application. Australian Government Publishing Service. Canberra.
- Masjidin Siregar. 1993. *Income and Employment Impacts of Indonesian Agricultural Sectors*. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Indonesia Volume XLI No. 4. Jakarta.
- Mitchell, Deborah. 1991. *Income Transfers in Ten Welfare States*. Avebury. Sidney.
- Miller, R.E and Blair. P.D. 1985. *Input-Output Analysis: Foundation and Extention*. Prentice Hall, Englewood Cliffs. New Jersey.
- Ruchiyat Deni. 2001. Sosialisasi RPP Penataan Ruang Kawasan Perdesaan: Suatu Konsep Landasan Kebijakan Pengembangan Kawasan Perdesaan. Makalah lokakarya 'Proyek Perintisan Pengembangan Perdesaan'. Badan Perencana Pembangunan Nasional. Jakarta
- Tjandrawan, Iwan. 1994. Dampak Investasi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Nasional (Analisis Input-Output). Skripsi. Institut Pertanian Bogor. Bogor